

Analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Desvira Auliani; Erni Achmad; Parmadi

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fak Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*E-mail korespondensi: Ddesvira@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to assess the extent of regional financial performance and how it influences regional spending in districts/cities in Jambi Province. Using secondary data in the form of a time series from 2016 to 2022. The Panel Data Regression Method is the analysis technique used in this research. Calculations using the Degree of Fiscal Decentralization Ratio, Financial Independence Ratio and PAD Effectiveness are used to test the impact on Regional Expenditures and analyze the level of Regional Financial Performance. The results obtained in this research are that the level of regional financial performance and the level of regional financial independence in the Districts and Cities of Jambi Province are in the very low category while the effectiveness of PAD is in the effective category. The estimation results obtained by the Fiscal Decentralization Ratio variable have no effect on regional spending with Prob. 0.4791 and the Regional Financial Independence Ratio has no effect on regional spending with Prob. 0.6869 Meanwhile, the estimated PAD Effectiveness variable has a significant negative effect on regional spending with Prob. 0.0448.

Keywords : *financial performance, degree of fiscal decentralization ratio, regional financial independence ratio, effectiveness of local original income*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kinerja keuangan daerah dan bagaimana pengaruhnya terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dengan menggunakan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2016 hingga 2022. Metode Regresi Data Panel merupakan teknik analisis yang digunakan penelitian ini. Perhitungan dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan dan Efektivitas PAD digunakan untuk menguji dampaknya terhadap Belanja Daerah dan menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah tingkat kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi berada pada kategori sangat rendah sementara efektivitas PAD berada pada kategori efektif. Hasil estimasi yang didapatkan variabel Rasio Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dengan Prob. 0.4791 dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dengan Prob. 0.6869 Sementara estimasi variabel Efektivitas PAD berpengaruh signifikan secara negatif terhadap belanja daerah dengan Prob. 0.0448.

Kata kunci : *kinerja keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah*

PENDAHULUAN

Proses kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan warganya dalam bentuk barang dan jasa disebut pertumbuhan ekonomi. Proses ini dapat meningkatkan kualitas hidup suatu negara yang nantinya akan berdampak pada turunnya tingkat pengangguran

(Hamzah, 2013). Dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi mengacu pada evolusi perekonomian fiskal suatu negara yang mencakup hal-hal seperti peningkatan kuantitas dan kualitas barang-barang industri yang diproduksi, pembangunan infrastruktur, perluasan jumlah lembaga pendidikan, peningkatan output dari barang-barang industri yang sudah ada dan kegiatan ekonomi dalam meningkatkan daya beli konsumen dan kemajuan lainnya. Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) riil merupakan salah satu indikator perluasan perekonomian suatu daerah. Penghitungan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan membandingkan PDB suatu daerah pada tahun sebelumnya dengan PDB tahun berikutnya (Astuti, 2015).

Undang-undang Pasal 33 Tahun 2004 dan Pasal 66 ayat 1 adalah yang mengatur pemerintah untuk mengelola dana daerah secara efisien, efektif, transparan, jujur, tertib, ekonomis dan taat hukum. Jika otonomi daerah didukung oleh kualitas kinerja yang kuat, maka otonomi daerah akan berhasil. Pengelolaan keuangan daerah menerapkan strategi kinerja yang berpusat pada konsep *value for money* penerapan prinsip *good governance* dan *outcome*. Kinerja pemerintah juga dapat diukur berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan belanja pemerintah digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam bentuk belanja modal yang akan menjadi ukuran besar dampaknya bagi kinerja pemerintah (Halim, 2004). Sementara itu, peran pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal bersifat terbatas dan tidak dapat mengendalikan seluruh kebijakan pemerintah daerah yang ada.

Kebijakan desentralisasi membantu pemerintah daerah merasa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat. Peningkatan akuntabilitas, akses yang sederhana terhadap sumber daya pusat bagi daerah, kemungkinan peningkatan daya tanggap dan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai akibat dari desentralisasi yang menunjukkan bahwa hal ini merupakan manfaat dari perubahan peran pemerintah. Pengalihan fungsi dan kebijakan dapat memfasilitasi pengembangan layanan oleh pemerintah daerah sebagai respons terhadap kebutuhan, preferensi, dan tekanan persaingan antar daerah. Hal ini juga dapat menumbuhkan inovasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

Istilah "otonomi" digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai desentralisasi. Kompetensi, hak, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan wujud praktis globalisasi yang mengharuskan pemberian wewenang yang lebih nyata dan mengikat kepada daerah, terutama dalam hal pembangunan, alokasi sumber daya dan pemanfaatan di masing-masing daerah.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan otonomi daerah, khususnya dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini Provinsi Jambi mempunyai 9 Kabupaten dan 2 Kota yang merupakan bagian dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengalokasian dan pemanfaatan pendapatan daerahnya. Dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terdapat kenyataan bahwa kinerja keuangan daerah berdasarkan data pendapatan asli daerah, anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah tergambar masih kurang mandiri. Dapat dilihat masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah dengan rata-rata nilai PAD lebih rendah dibandingkan belanja daerah. PAD merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah

yang masih mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Selain itu, tuntutan pelayanan publik didanai dengan uang daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memajukan kesejahteraan masyarakat (publik). Mengingat betapa pentingnya pengalokasian dana daerah untuk kepentingan publik, perubahan pola belanja ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah daerah.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan data panel dimana data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Dengan menggunakan data sekunder dimana data dapat diperoleh dengan instansi yang telah dipublikasi dan dapat diakses. Penelitian ini menyelidiki keterkaitan antar variabel dalam analisis kinerja keuangan daerah dan belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2016 hingga 2022.

Untuk melihat kinerja keuangan berdasarkan tiga nilai rasio keuangan yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD digunakan dalam penelitian deskriptif pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2016 hingga tahun 2022. Adapun rumus yang dapat digunakan dijelaskan sebagai berikut:

Rasio derajat desentralisasi fiskal (RDDF)

Derajat desentralisasi fiskal menyatakan seberapa besar kekuasaan dan akuntabilitas yang diserahkan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah agar melaksanakan pembangunan (Nadeak et al., 2022).

$$Rasio\ DDF = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai operasional, inisiatif, dan fasilitas masyarakat setelah masyarakat melunasi pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendanaan besar bagi daerah ditunjukkan oleh rasio kemandirian keuangan daerah (Halim, 2014).

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat} \times 100 \dots\dots\dots(2)$$

Efektivitas PAD

Kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target dapat diuji dengan Rasio Efektivitas PAD.

$$Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ Penerimaan}{Target\ Penerimaan\ Pendapatan} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Untuk menguji pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menggunakan bantuan software *Eviews12* dengan model analisis kuantitatif. Untuk menjawab persoalan kedua digunakan alat analisis regresi Data Panel dengan rumus berikut:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 RDDFit + \beta_2 RKK_{it} + \beta_3 REPAD_{it} + e \dots\dots\dots(4)$$

Dimana :

- BD = Belanja daerah
 i = Jumlah observasi
 t = Tahun data observasi (7 Tahun)
 β_0 = Konstanta
 β_1 = Koefisien regresi
 RDDF = Rasio derajat desentralisasi fiskal
 RKKD = Rasio kemandirian keuangan daerah
 REPAD = Rasio efektivitas PAD
 e = Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD ditunjukkan pada tabel 1 :

Tabel 1. Rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD

Kabupaten/Kota	Rata-rata RDDF setiap daerah tahun 2016-2022 (%)	Rata-rata RKKD setiap daerah tahun 2016-2022 (%)	Rata-rata Efektivitas PAD setiap daerah tahun 2016-2022 (%)
Kab.Kerinci	6,24	8,72	98
Kab.Merangin	6,82	8,82	99
Kab.Sarolangun	7,04	9,73	93
Kab.Batanghari	8,2	10,36	85
Kab.Muaro Jambi	6,87	8,91	110
Kab.Tanjabtim	5,23	6,12	116
Kab.Tanjabbar	7,56	9,18	114
Kab.Tebo	6,99	8,9	103
Kab.Bungo	11,51	15,36	104
Kota Jambi	22,88	33,04	99
Kota Sungai Penuh	6,53	6,64	82
Rata-rata	8,62	11,44	100
Kategori	Sangat Rendah	Rendah Sekali	Efektif

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Derajat desentralisasi fiskal pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi yaitu 8,62% dimana nilai tersebut masuk pada kategori sangat rendah. Nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi yaitu 11,44% dimana nilai tersebut masuk pada kategori rendah sekali dan selanjutnya rata-rata pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi yaitu 100% dimana nilai tersebut masuk pada kategori efektif.

Untuk melihat pengaruh kinerja keuangan daerah (Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dengan menggunakan regresi Data

panel melalui *Random Effect Model* sebagai model terbaik yaitu dapat dipaparkan pada Tabel 2, sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil analisis model terbaik *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RDDF?	0.010434	0.014669	0.711342	0.4791
RKKD?	0.003890	0.009613	0.404617	0.6869
EPAD?	-0.001130	0.000553	-2.041211	0.0448

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 2 dengan Persamaan model rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap belanja daerah dapat dijelaskan melalui hasil estimasi berikut :

$$BD_{it} = 27.793 + 0.0104RDDFit + 0.0038RKKD_{it} - 0.0011EPAD_{it}.....(2)$$

Berdasarkan Persamaan Model 2 dapat dijelaskan hasil estimasi terhadap *Random Effect Model (REM)* adalah jika terjadi perubahan antara rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD maka konstanta sebesar 27,793. Hal ini berarti apabila rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD tetap maka belanja daerah pada Kab/Kota diprovinsi Jambi sebesar 27,793.

Variabel Derajat Desentralisasi Fiskal mempunyai koefisien regresi 0.0104 maka adanya hubungan positif artinya setiap kenaikan 1% dari variabel Derajat Desentralisasi Fiskal dengan asumsi variabel lain tidak berubah maka belanja daerah akan naik sebesar 0.0104%. Variabel Kemandirian Keuangan daerah mempunyai koefisien regresi 0.0038 maka adanya hubungan positif artinya setiap kenaikan 1% dari variabel Kemandirian Keuangan daerah dengan asumsi variabel lain tidak berubah maka belanja daerah akan naik sebesar 0.0038%. Variabel Efektivitas PAD mempunyai koefisien regresi 0.0011 maka adanya hubungan negatif artinya setiap kenaikan 1% dari variabel Kemandirian Keuangan daerah dengan asumsi variabel lain tidak berubah maka belanja daerah akan turun sebesar 0.0011%.

Koefisien determinasi (R²)

Pengaruh yang dijelaskan oleh variabel independent terhadap variabel dependent dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil uji koefisien determinasi (R²)

R-Squared	Adjusted R-Squared
0.095472	0.058300

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3 Nilai R-Square sebesar 0.058300 artinya variabel independen dalam penelitian ini mempunyai pengaruh sebesar 5,8% terhadap variabel belanja daerah dan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini mempunyai pengaruh sebesar 94,2%.

Uji F-statistic

Pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 : Hasil Uji F-Statistic

F-Statistic	Prob (F-Statistic)
2.568364	0.060874

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4 Nilai Probabilita F-Statistic sebesar $0.060874 > 0.05$ menunjukkan bahwa pada saat yang bersamaan tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap belanja daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jambi.

Uji t

Pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 : Hasil uji t

Variabel	t-Statistic	Probabilitas
Derajat Desentralisasi Fiskal	0.711342	0.4791
Kemandirian Keuangan Daerah	0.404617	0.6869
Efektivitas PAD	-2.041211	0.0448

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji t menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, variabel independen rasio desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dengan hasil estimasi REM sebesar 0,4791 yang lebih besar dari 0,05. Kedua, variabel independen rasio kemandirian keuangan daerah juga tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dengan hasil estimasi REM sebesar 0,6869 yang lebih besar dari 0,05. Terakhir, variabel independen efektivitas PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dengan hasil estimasi REM sebesar 0,0448 yang lebih kecil dari 0,05.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2016-2022, kemampuan kinerja keuangan berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal masih berada pada kategori rendah sekali dengan jumlah rata-rata rasio 8,62% artinya kemampuan kinerja keuangan dinilai buruk. Kemandirian keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2016-2022 berada pada kategori rendah sekali dengan jumlah rata-rata rasio 11,44%, artinya daerah memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada transfer dana perimbangan. Efektifitas PAD pada Kab/Kota di Provinsi Jambi periode 2016-2022 berada dikategori efektif dengan nilai rata-rata 100% artinya pemerintah telah mengalokasikan dan memanfaatkan PAD dengan efektif dan optimal.

Berdasarkan hasil regresi dengan model terbaik REM didapatkan bahwa variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap variabel belanja daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jambi, hal ini dapat dilihat bahwa kontribusi PAD belum berpengaruh sepenuhnya terhadap kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dan kemandirian daerah. Sedangkan Variabel Efektifitas PAD berpengaruh secara signifikan dengan pola hubungan negatif terhadap belanja daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jambi.

Saran

Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Kabupaten dan Kota diharapkan dapat lebih maksimal dalam menerapkan kebijakan dan meningkatkan sumber pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Penggunaan pendapatan daerah diharapkan dapat dimanfaatkan dan dialokasikan dengan baik agar dapat menghasilkan ataupun meningkatkan kinerja keuangan daerah yang berkualitas. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektifitas PAD yang sudah baik tetap terus konsisten terlebih bisa meningkat dan mengupayakan kemajuan pengelolaan keuangan daerah ditahun-tahun mendatang. Pemerintah juga diharapkan mampu mengefisiensikan pengeluaran agar tidak melebihi penerimaan daerah dan mengalokasikan pengeluaran daerah untuk belanja yang dapat memberikan dampak berupa penerimaan bagi daerah agar pengeluaran yang dikeluarkan diimbangi dengan penerimaan yang besar sehingga mampu meningkatkan kemampuan fiskal serta meningkatkan kemandirian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceng, A. H. (2018). Analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat. *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 1(4).
- Akhmadi, M. H., & Sumardjoko, I. (2017). The implications of local government spending efficiency on the regional economic performance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 126.
- Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. (2009). *Metodologi penelitian ekonomi dan penerapannya* (1st ed.). IPB Press.
- Andriyani, N., & dkk. (2020). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*.
- Arsa, L. K. (2015). Pengaruh kinerja keuangan pada alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2006 s.d 2013. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan* (5th ed.). Upp Stim Ykpn.
- Astuti, W. (2015). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan (Studi pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa periode 2007-2011). *Jurnal Ebbank*, 6(1), 1–18.
- Backhaus, J. G., & Wagner, R. E. (1987). The Cameralists: A public choice perspective. *Public Choice*, 53(1), 3–20. <https://doi.org/10.1007/BF00115651>
- Corlett, W. J., & Aigner, D. J. (1972). *Basic econometrics*. The Economic Journal, 82(326).
- Demora, V. (2016). Analisis derajat desentralisasi dan kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(1). Retrieved from <http://unja.ac.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2016-2022). *APBD*. Retrieved from <https://djk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Elizar, S., & Kiki, R. A. P. (2016). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16(1).

- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Jurnal Equity*, 22(2), 197–214.
- Ghozali, I. (2013). *Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep, dan aplikasi dengan EVIEWS 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., dkk. (2004). *Pengelolaan keuangan daerah, seri bunga rampai manajemen keuangan daerah*. Upp Stim Ykpn.
- Halim, A. (2001). *Bunga rampai: Manajemen keuangan daerah* (1st ed.). Upp Amp Ykpn.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah* (Revised ed.). Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Manajemen keuangan daerah* (Revised ed.). Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik-akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hamzah, A. (2013). Analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Hardani, et al. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta.
- Ibnu Syamsi. (1994). *Dasar-dasar kebijakan keuangan negara*. Rineka Cipta.
- Indonesia. (1957). *Undang-Undang Darurat No. 19 tentang Pembentukan Daerah (Provinsi)*.
- Indonesia. (1958). *Undang-Undang No. 61 tentang Pembentukan Daerah (Provinsi)*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 54 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 32 tentang Otonomi Daerah*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 33 Pasal 66 Ayat 1 tentang Otonomi Daerah*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 25 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang No. 21 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 tentang Otonomi Daerah*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang No. 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang No. 1 tentang Otonomi Daerah*.
- Kadek, M., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Pengaruh kinerja keuangan daerah pada alokasi belanja modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 426–443.
- Kasiram, M. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Uin-Maliki Press.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen kinerja sektor publik*. Upp Stim Ykpn.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mangkoesebroto, G. (1994). *Kebijakan publik Indonesia: Substansi dan urgensi*. Gramedia Pustaka.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi.
- Markus, M. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Martini, K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Pengaruh kinerja keuangan daerah pada alokasi belanja modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2).
- Musgrave, R. A., & Peacock, A. T. (Eds.). (1958). *Classics in the theory of public finance*. Macmillan.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance*. McGraw-Hill.
- Musgrave, R. A. (1993). *Keuangan negara dalam teori dan praktek* (5th ed.). Erlangga.

- Nadeak, M. F., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1). Retrieved from <http://lipi.go.id>
- Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Manado tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3).
- Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1967). *The growth of public expenditure in the United Kingdom*. George Allen & Unwin.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi. (2024). *Sekilas Jambi*. Retrieved from <http://ppid.jambiprov.go.id/profil>
- Purba, R. B., Umar, H., Nasution, A. P., & Amelija, N. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 3(2), 204–2015.
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(2). Retrieved from <http://unla.ac.id>
- Sagala, L. M., & Parmadi. (2013). Analisis kemampuan keuangan daerah: Studi kasus Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(April), 32–40. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v0iApril.1696>
- Sucandrawati, N. K. A. (2016). Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25243>
- Sukirno, S. (2013). *Teori pengantar makro ekonomi*. PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Sularso, H., & Restianto, Y. (2011). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(1).
- Sunargo, S., & Hastuti, D. (2019). Mengatasi perilaku kerja kontraproduktif melalui peran integratif politik organisasional dan kecerdasan emosional pada era revolusi industri 4.0. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2), 45 - 54. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i2.8961>
- Trijana, M. (2018). Peran kinerja keuangan daerah dalam pembentukan belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. (Unpublished thesis).
- Tulangow, A. P., Runtu, T., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2016). Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 4(3), 564–571. <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.14290>
- Wagner, R. E., & Weber, B. (1977). Wagner's law, fiscal institutions, and the growth of government. *National Tax Journal*, 30(1), 59–68. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/41862113>